

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Partisipasi Politik

Di negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik adalah sesuatu hal yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan politik, dengan menyampaikan bahwa partisipasi politik menjadi salah satu faktor utama. Artinya jika pemerintah berkuasa dalam suatu negara agar bisa disebut sebagai negara demokrasi maka negara harus menyediakan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Di sisi lain warga negara yang bersangkutan juga harus menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi, jika tidak maka tingkat demokrasi negara itu masih diragukan.¹ Bersumber dari gagasan tersebut maka partisipasi politik adalah suatu komponen yang sangat berarti dalam kehidupan politik pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Partisipasi politik bukan hanya tentang memberikan hak suara untuk memilih pemimpin, tetapi juga harus mengikuti kegiatan lainnya agar partisipasi politik warga negara yang aktif dapat memperlihatkan bahwa suatu negara layak disebut sebagai negara demokrasi.

Partisipasi politik adalah aspek penting dari dalam suatu tatanan negara demokrasi sekaligus adalah ciri khas dari politik modern. Politik modern pada dasarnya ialah aktivitas yang dilakukan warga negara untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk saling mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.² Dari dasar inilah yang digunakan masyarakat agar dapat ikut serta dalam proses menentukan isi politik. Perilaku- perilaku masyarakat yang demikian termasuk dalam konteks perilaku politik yang

¹ Sahid, Kamarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor. Ghalia Indonesia

² Sudijono Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995) Hlm, 67.

mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seseorang atau individu ikut serta dalam kegiatan proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.

1. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian “. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. jadi partisipasi merupakan mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara³. Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ
 اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
 أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا

³ Syahrial Syarbini (dkk), Sosiologi dan Politik,(JAKARTA:Ghalia Indonesia,2001)Hl.69.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”* (Q.S an-Nisa ayat 58)

Kita dapat melihat bahwa ayat diatas menjelaskan Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁴

Menurut Miriam Budiarto, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang individu atau kelompok orang agar ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik dengan cara memilih pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung⁵. Partisipasi politik ini mencakup proses kegiatan dengan memberikan suara dalam pemilihan umum. Hal yang terpenting dari partisipasi politik ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dalam membuat kebijakan. Pemerintah dalam hal ini secara langsung melakukan pelaksanaan keputusan politik dan warga negara yang menentukan keputusan politik. Partisipasi politik ini fokus pada kegiatan politik

⁴ A. Dzajuli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003) H.25

⁵ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet IV, Hal.369*

dan dalam prosesnya terdapat masyarakat di dalamnya. Selain itu juga masyarakat memberikan hak suara pada kegiatan politik, dengan hal ini hak suara masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan keputusan politik. Menurut Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi yang berpendapat tentang partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan bentuk sukarela melalui, dari mana mereka ikut serta mengambil bagian dari dalam proses pembentukan kebijakan umum⁶. Sedangkan partisipasi politik menurut Keith Faulks ialah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini merupakan keterlibatan dalam proses aktif.⁷

Partisipasi menurut Subakti memiliki beberapa tipologi yaitu partisipasi aktif, pasif, dan apatis. Partisipasi aktif adalah merupakan suatu sikap yang menunjukkan keaktifan dalam proses kegiatan politiknya⁸. Seseorang individu yang berpartisipasi aktif cenderung pada kalangan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, perhatian dan minat yang tinggi dalam kegiatan politik. Sedangkan partisipasi pasif yaitu sikap masyarakat yang menerima kebijakan dan keputusan pemerintah. Seseorang atau kelompok pada partisipasi pasif cenderung memiliki tingkat kesadaran yang rendah namun perhatian dan kepercayaan pada pemerintah juga masih tetap tinggi dalam kehidupan politik. Selain itu juga, ada beberapa sikap masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif dan pasif. Sikap ini memiliki tingkat kesadaran politik

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),367

⁷ Keith Faulks, *Sosiologi Politik* (Bandung: Nusa Media, 2010),226

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Hal 180

yang rendah dalam perhatian dan kepercayaan kepada pemerintah dalam kegiatan politik. Sikap ini disebut apatis atau golput.

Menurut Milbrath dan Goel, sebagaimana yang dikutip dari Budiardjo partisipasi memiliki beberapa pola yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu

- 1) Pemain (*Gladiators*) adalah masyarakat yang sangat aktif dalam dunia politik
- 2) Penonton (*Spectators*) adalah masyarakat yang aktif secara minimal dan termasuk yang menggunakan hak pilihnya
- 3) Apatitis (*Apathetics*) adalah masyarakat yang tidak aktif sama sekali dan tidak memakai hak pilihnya

Berkaitan dengan penelitian. Partisipasi santri dalam memilih aktif dan pasif santri terletak pada tindakan pilihan rasional mereka ketika hendak melakukan atau melaksanakan pemilihan, sebab dalam berpartisipasi memilih pemula sebagian besar memiliki sifat yang apatis dan rendah dalam pengetahuan politik. Sehingga dalam berpartisipasi seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama dalam lingkungan pondok pesantren yang lebih rentan dipengaruhi oleh pendiri pondok pesantren yaitu kiai. karena mereka terpujau kepada seseorang aktor atau tokoh yang dapat dipercaya dan dijadikan sosok panutan yang mampu meningkatkan pola pikir santri. Terutama pada hubungan timbal balik yang dimiliki oleh santri lebih melibatkan pada hasil karya seseorang guru atau kiai, semacam postingan, majalah dan opini sebagai panutan serta pengetahuan mereka bahwa pesantren lebih mengarah atau menuju pada pasangan calon. Santri yang dikatakan pasif dalam berpartisipasi adalah santri yang tidak ingin menyuarakan haknya pada aktivitas politik tersebut.

Oleh karena itu, dalam negara-negara demokrasi pada umumnya menganggap bahwa

semakin banyak warga negara berpartisipasi dalam bepolitik maka negara itu akan menjadi lebih baik. Dalam implementasinya bahwa tingkat partisipasinya tinggi maka akan menampilkan warga negara ikut serta dan memahami masalah politik yang sedang terjadi. Sebaliknya, tingkat partisipasinya rendah maka pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, sebab bisa ditafsirkan bahwa banyak warga atau masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap permasalahan kenegaraan.⁹ Secara sederhana partisipasi politik adalah kedudukan warga negara dalam kehidupan politik yang bersifat sosial.

Kesimpulan dari penjelasan diatas, partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas seseorang atau sekelompok orang dalam perihal mempengaruhi keputusan atau pengambilan kebijakan pemerintah, baik itu dalam perihal memilih pemimpin ataupun juga membentuk perilaku seseorang atau kelompok terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Maka dari itu partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat ataupun pemerintah. Bagi masyarakat atau warga negara dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap kinerja pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan. Sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

b. Tujuan Partisipasi Politik

Terdapat beberapa keterlibatan politik dengan berbagai tujuan, sebagai berikut

- 1) Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mempengaruhi proses pembuatan

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), H.371

kebijakan, untuk mengontrol pemerintah yang akan terpilih dan menjadi alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok yang mempengaruhi pemerintah yang khususnya terlibat dalam politik.¹⁰

- 2) Menjadikan alat untuk mengontrol masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya pemberontakan oleh rakyat, dan menjadi sebuah tata cara untuk meningkatkan dukungan tanpa perlawanan terhadap kebijakan pemerintahan.

c. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Robert Lane, terdapat empat fungsi partisipasi politik bagi individu atau seseorang, yaitu¹¹

- 1) Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
- 2) Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan dalam penyesuaian sosial.
- 3) Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
- 4) Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar dan psikologi tertentu.

Adapun partisipasi politik mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah, sebagai berikut

- 1) Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- 2) Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat dalam memberikan

¹⁰ Bung El. “*Partisipasi masyarakat dalam politik*”. Artikel (online) tersedia di: <https://elpakpahan.wordpress.com/2013/09/19/partisipasi-masyarakat-dalam-politik/> diakses pada tanggal 7 januari 2020

¹¹ Michael Rush dan Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: PT.Rajawali 1989) h.131.

masukannya atau kritik bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan program pembangunan pemerintah

d. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut pendapat dari Cholisin dalam hal ini merujuk pada besar rendahnya kesadaran politik serta keyakinan pemerintah, sistem politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu partisipasi pasif, partisipasi aktif, partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif tertekan (apatis).¹² Partisipasi aktif, adalah apabila seseorang mempunyai pemahaman politik dan keyakinan kepada pemerintah maka partisipasi politiknya tinggi. Tapi sebaliknya bila pemahaman politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif atau tertekan (apatis). Sedangkan partisipasi militan radikal terjadi apabila pemahaman tentang politik besar namun kepercayaan kepada pemerintah rendah dan apabila pemahaman politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasinya disebut tidak aktif (pasif).

Bentuk – bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood, yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional.¹³

- 1) Partisipasi politik konvensional
 - a) Pemberian suara atau voting
 - b) Diskusi politik
 - c) Kegiatan kampanye

¹² Cholisin, dkk, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Politik, UNY Press, Yogyakarta.

¹³ Gabriel A. Almond dalam Mohtar Mas'ood dan Dr Colin Mac Andrews (editor), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1991), hal. 46

- d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
- 2) Partisipasi politik non-konvensional
 - a) Pengajuan petisi
 - b) Berdemonstrasi
 - c) Konfrontasi atau pertentangan
 - d) Mogok
 - e) Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, seperti pengrusakan dan pembakaran
 - f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia, seperti penculikan, pembunuhan dan perang.

Menurut Rush dan Althoff, tinggi- rendahnya partisipasi politik seseorang diukur melalui tingkatan intensitas individu atau diri sendiri tersebut dalam aktivitas politik. Rush dan Althoff menyatakan terdapat Sembilan tingkatan dalam tindakan partisipasi politik yang dilakukan seseorang, yaitu

- 1) Voting (pemberian suara dalam pemilu) merupakan tingkat partisipasi paling rendah dikarenakan hanya dilakukan secara periodic atau tidak rutin
- 2) Keikutsertaan dalam diskusi politik
- 3) Keikutsertaan dalam kampanye politik, rapat umum, demonstrasi dll.
- 4) Tercatat sebagai anggota organisasi yang bernuansa politik
- 5) Tercatat sebagai pengurus aktif dalam organisasi yang bernuansa politik
- 6) Menjadi anggota biasa dalam sebuah partai politik
- 7) Menjadi pengurus aktif dalam sebuah partai politik
- 8) Secara profesional bekerja mencari jabatan politik

- 9) Secara profesional menduduki sebuah jabatan politik di pemerintahan atau partai politik

Menurut David F. Roth dan Frank yang dikutip dalam bukunya Rahman mengatakan wujud dari partisipasi warga negara yang berdasarkan intensitasnya. Apabila keseriusan kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk sebuah piramida partisipasi politik. Kelompok paling bawah pada gambaran piramida partisipasi politik adalah kelompok yang sama sekali tidak ikut serta dan tidak melaksanakan kegiatan politik. Oleh Roth dan Wilson menyebutnya sebagai kelompok apolitis. Kelompok yang berada di atas politis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini pada umumnya sering mendatangi rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media sosial dan memberikan suara dalam kegiatan pemilu. Setelah itu satu tingkatan di atas kelompok pengamat ialah kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas tingkatan piramida adalah kelompok aktivis. Kelompok ini merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai dan pemimpin kepentingan.

Bentuk partisipasi yang dilakukan pemuda ialah berupa demonstrasi, pemogokan, dan kegiatan protes. Cara yang digunakan oleh pemilih pemula untuk berpartisipasi adalah bergabung dengan salah satu partai politik yang ada di daerahnya, mengikuti kegiatan kampanye dan mengikuti diskusi politik di daerahnya. Karakteristik utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu tentang latar belakang tingkat partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin

setiap komunitas¹⁴. Karena masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam pemilu. Dan juga menjadi bagian dari partisipasi dalam dinamika kegiatan politik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan partisipasi politik seseorang dapat diukur dari tingkat intensitas individu dalam kegiatan politik yang dilakukan seperti pemberian suara dalam pemilu, dan keikutsertaan dalam kegiatan politik lainnya.

e. Faktor – Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Menurut Milbrath, dikutip dalam buku Pengantar Sosiologi Politik karya Rafael Maran, menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik.¹⁵

Lima faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain:

1) Adanya perangsang politik.

Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal maupun informal.

2) Faktor karakteristik pribadi seseorang.

¹⁴ Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia...,h.286

¹⁵ Raga Maran, Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rineka Cipta Indonesia, 156) dikutip oleh Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, *Artikel* (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> (9 oktober 2019) h. 6.

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.

3) Karakteristik sosial

Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

4) Situasi atau lingkungan politik itu sendiri

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik

5) Pendidikan politik

Ada pula yang menambahkan pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya.

Selain faktor pendukung, disebutkan pula faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain¹⁶

¹⁶ Agus Muslim, “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat”, (on-line) tersedia di: <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl->

- 1) Kebijakan Induk Organisasi Selalu Berubah
Maksud dari kebijakan induk selalu berubah yaitu, organisasi atau badan yang dipandang elite politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seorang pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi.
- 2) Pemilih Pemula yang Otonom
Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politiknya tidak independen, pemilih pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi.
- 3) Dukungan yang Kurang Dari Induk
Untuk mensukseskan dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula, komunikasi dengan induk organisasi harus terjalin baik dan tetap harus diperhatikan.

2. Perilaku Politik

Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 22 UU No 10 tahun 2008 pemilih merupakan warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih dan yang sudah atau belum menikah. Selanjutnya dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No 10 tahun 2008 menjelaskan bahwa pemilih mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar di penyelenggara pemilu dalam pemilih dan pada saat hari pemungutan suara yang

telah genap berumur 17 tahun atau lebih dan sudah atau belum menikah.¹⁷

Di dalam ilmu Fikih Siyash yang diatur bagaimana cara bersikap subjek dari politik atau siyash sendiri. Ketaatan rakyat kepada seorang pemimpin merupakan sebuah perintah dalam agama yang artinya sebuah kewajiban bagi rakyat untuk ikut dalam menentukan siapa pemimpinnya, dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”* (Q.S an-Nisa ayat 59).

Dari ayat diatas, dapat di mengerti bahwa setiap orang atau kelompok wajib mengikuti perintah Allah SWT dan Rosul-Nya dan pemimpin diantara mereka.

¹⁷ UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (On-line), tersedia di : http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_10.pdf diakses pada tanggal 13 juli 2019

pukul 13:39 wib

Dalam hal partisipasi politik itu termasuk dalam taat kepada pemimpin, oleh karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemerintah untuk memberikan hak suara untuk memilih pemimpin atau wakilnya.

Perilaku politik adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan masyarakat, dalam suatu tujuan maka akan tercapai kebijakan atau kekuasaan untuk mengimplementasikan keputusan politik sebagai bentuk tujuan seseorang atau kelompok.¹⁸ Selanjutnya perilaku politik yang kegiatannya dinyatakan sebagai kegiatan yang mempengaruhi perilaku atau sikap politik, yaitu yang berkaitan dengan kesiapan berinteraksi terhadap objek lingkungan tertentu atau suatu penghayatan terhadap objek tersebut.¹⁹ Perilaku politik yang kegiatannya berhubungan langsung dengan proses politik, baik dalam pembuatan kebijakan politik maupun pelaksanaan politik.

Ada beberapa faktor dalam perilaku politik antara lain:

- a. Memahami latar belakang sejarah, sejarah di masa lalu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dengan adanya proses. Hal ini dikarenakan budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang waktu.
- b. Faktor budaya politik yang dapat mempengaruhi perilaku atau sikap masyarakat dalam berpolitik. Budaya politik agar dapat berfungsi dengan baik maka tingkat keselarasan antara budaya nasional dan struktur politiknya.
- c. Perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam menjalankan perilaku politiknya

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasaran, 1992), 131

¹⁹ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Press, 1995), 4.

- d. Pendidikan dan komunikasi yang dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang atau kelompok. Karena semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi juga tingkat kesadaran politiknya.
- e. Faktor lingkungan sosial politik, dimana faktor ini dapat mempengaruhi aktor politik secara langsung, misalnya keadaan keluarga, cuaca dan ancaman
 Adapun dalam perilaku pemilih, terdapat juga beberapa pendekatan atau faktor yang mempengaruhi didalamnya, yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor pilihan rasional.
 - a. Faktor Sosiologis
 Faktor psikologis merupakan faktor yang menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam memastikan perilaku atau sikap pemilih. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan, ciri latar belakang sosiologis, seperti agama, jenis kelamin, umur dan kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras dan wilayah asal.
 - b. Faktor psikologis
 Merupakan aspek yang lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologi seseorang dalam menentukan perilaku politik, pendekatan psikologis lebih meningkatkan tentang konsep psikologis. Faktor psikologis menekankan pada sebagian aspek sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai, terhadap calon, dan identifikasi terhadap calon atau kandidat.
 - c. Faktor pilihan rasional
 Merupakan aspek yang menilai tentang isu-isu politik yang menjadi pertimbangan yang sangat penting. Dalam hal ini para pemilih akan memastikan pilihan calon berdasarkan penilaiannya terhadap visi dan misi politik yang diajukan oleh calon atau kandidat, dengan mempertimbangkan perhitungan untung rugi dalam menentukan opsi politiknya dan

prestasi yang pernah diarahi calon atau kandidat sebelumnya.

3. Pesantren dalam Pusaran Politik

Secara historis, fungsi dasar pesantren adalah sebagai lembaga yang mengajarkan pendidikan Islam. Namun demikian, pesantren juga mempunyai pengaruh dan peran politik yang penting di tengah masyarakat tradisional. Oleh karena itu, pesantren selalu berada di dalam pusaran arus tarik-menarik kepentingan politik, sehingga tidak sedikit pesantren yang akhirnya melibatkan diri kedalam aktivitas politik. Di Kalangan umat Islam, kiai adalah salah satu seseorang elite yang memiliki kedudukan yang mulia atau terhormat, karena dianggap sebagai figur yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Kiai juga dipandang sebagai sosok pewaris nabi sehingga kiai menjadi sumber legitimasi baik dalam dominan agama maupun sosial politik.²⁰

a. Kiai

Kehadiran kiai di pondok pesantren sangat penting. Karena pentingnya kiai di pondok pesantren dapat dilihat dari berbagai fungsi dan perannya. Kiai sering berada pada posisi sebagai seorang perintis, pendiri, pengelola dan juga sebagai guru. Selain menjadi sosok figur yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaannya dan menjadi panutan masyarakat, kiai juga memiliki posisi strategis dan sentral dalam lingkungan masyarakat. Posisi sentral kiai adalah sebagai orang yang berpendidikan dan kharismatik. Kiai dipandang sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan pondok pesantren. Selain sosok yang kharismatik, apapun yang diajarkan oleh seorang kyai dipandang sebagai kebenaran yang mutlak dan tidak bisa terbantahkan. Dalam kehidupan pesantren, sikap tawadhu antara santri dan kiai sangat erat. Secara umum para santri berpendapat bahwa ilmu adalah hal yang sudah mapan dan dapat diperoleh melalui berkah kiai.

²⁰ Kiswanto, Heri. 2008. *Gagalnya Peranan Politik Kyai Dalam Mengatasi Krisis Multi Dimensiona*. Yogyakarta: Nawasae Press

Partisipasi kiai dalam politik sebenarnya bukanlah sebagai fenomena yang baru lagi. Sejak lama peran kyai dalam politik sangat besar, secara normatif partisipasi kiai dalam politik memiliki landasan hukum yang kuat yang bersumber dari hukum Islam. Secara empiris partisipasi kiai dalam politik tercermin pada zaman rasulullah. Dengan dasar normatif dan landasan empiris inilah menjadi motivasi kyai dalam berpolitik. Dalam sejarah Indonesia, kiai telah berpartisipasi dalam isu-isu politik, baik pada pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, ataupun pada periode reformasi masa kini, walaupun kuantitas dan kualitas setiap periode berbeda-beda. Dalam hal ini kiai memiliki andil yang cukup besar dalam proses politik Indonesia. Peranan sosial, kiai sering diminta pertolongan oleh masyarakat untuk memberikan perantara kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Peran dalam kemasyarakatan, kiai sering diundang dalam rapat-rapat baik lokal maupun nasional. Dalam bidang politik, sekarang ini banyak kiai yang terlibat dalam politik baik secara langsung dan tidak langsung. Kiai terlibat langsung dalam politik, seperti menjadi pengurus partai politik dan sebagai anggota legislatif. Adapun secara tidak langsung, kiai hanya memberikan dukungan kepada partai politik maupun dukungan kepada calon baik legislatif maupun eksekutif.

Kita bisa saksikan tingkat intensitas dan bentuk keterlibatan pondok pesantren dalam politik bisa bermacam-macam, baik secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan momen-momen penting dalam politik, seperti pemilihan umum. Mengingat permasalahan tersebut, dalam hal ini keterlibatan pesantren dalam politik dan dampak-dampak yang ditimbulkan tidak cukup hanya menggunakan satu teori. Guna memperjelas pemahaman yang utuh, kita menggunakan tiga pendekatan teoritis untuk menjelaskan permasalahan diatas, yaitu

b. Pengaruh Ekonomi dalam Politik

Sistem politik liberal sebagaimana yang dianut di negara Indonesia, seperti interaksi-interaksi politik tidak bisa diidentifikasi berdasarkan uraian keagamaan semata karena juga berkaitan dengan tawar-menawar kepentingan yang bersifat ekonomis. Oleh karena itu, studi tentang dampak suatu sikap perilaku politik sebagaimana yang terjadi di pesantren, juga harus mesti dilihat dalam kerangka ekonomi politik. Hubungan antara sistematis dalam teori ekonomi serta politik sebagaimana yang dijelaskan diatas dapat dilihat tiga kemungkinan. Pertama, terdapat hubungan kausal antara ekonomi dan politik yang dalam hal ini sering disebut model ekonomi politik deterministik atau keyakinan. Pada model ini mengasumsikan bahwa hubungan antara deterministic, ekonomi dan politik, adalah politik menentukan aspek-aspek dan institusi ekonomi untuk memastikan proses-proses politik. Kedua, terdapat hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik yang sering disebut model ekonomi politik interaktif. Maka fungsi-fungsi politik dan ekonomi dianggap berbeda tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga, terdapat hubungan perilaku yang berkelanjutan antara ekonomi dan politik²¹. Aktivitas ekonomi semacam juga kegiatan lain dalam masyarakat yang tidak terlepas dari konteks politik, sebab sistem politik tidak hanya menentukan power relation atau hubungan kekuasaan dalam masyarakat, namun juga menentukan nilai atau norma yang sedikit-banyak akan menentukan apa dan bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Deliarnov, teori ekonomi politik merupakan sebuah perspektif analisis ekonomi terhadap proses politik, yang di dalamnya terdapat

²¹ Martind Staniland, "What is Political Economy?: A study of Sosial Theory and Underdevelopment", dalam Deliarnov, Ekonomi Politik, (Jakarta:Erlangga, 2003), hlm.9

kajian tentang institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan keputusan ekonomi berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompok ataupun untuk masyarakat luas. Hal ini dibutuhkan analisis kritis, sebab posisi politik pesantren yang strategis akan memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari proses-proses politik yang dimainkan.

c. Politik Hegemoni

Tentang teori hegemoni yang digunakan untuk menjelaskan posisi pesantren dan politik, karena interaksi komunikasi pesantren dengan politik dan kekuasaan yang sangat memungkinkan pesantren berada dalam posisi inferior dan terhegemoni oleh politik kekuasaan. Hegemoni berkembang menjadi teori politik setelah digunakan oleh Gramsci yang menyebut hegemoni sebagai ide yang mendukung kekuasaan kelompok sosial politik tertentu. Menurut Gramsci, teori hegemoni adalah “supremasi suatu kelompok sosial yang memanifestasikan dirinya dalam dua cara, sebagai “dominasi “ dan sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral “. Sebuah kelompok sosial yang mendominasi kelompok antagonis, yang cenderung “melikuidasi atau menundukkan²². Dalam kutipan tersebut menampilkan bahwa kalau teori hegemoni memiliki dua konsep dasar yang penting, yaitu dominasi dan kepemimpinan politik. Dengan kata lain, hegemoni dijalankan dengan menguasai kepemimpinan politik dan memperkuat superioritas kelompok dominan. Disini penguasaan dilakukan tidak dengan cara kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dipahami. Dalam konteks keterlibatan pesantren dalam politik, posisi pesantren dikhawatirkan selalu

²²Pembahasan tentang teori hegemoni Gramsci dapat dibaca dalam tulisan Nezar Patria dan Andi Arif, Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

berada di dalam posisi yang terhegemoni. Dengan demikian pesantren hanya menjadi unsur subordinat dari politik sehingga pikiran dan kemampuan kritis dan afektifnya digiring untuk mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan politik. Kelas dominan yang dipresentasikan oleh kekuatan politik praktis yang dapat melakukan penguasaan kepada pesantren menggunakan agama sebagai ideologi. Kekuatan politik praktis dapat merKayas kesadaran komunitas pesantren yang sehingga penuh kesadaran mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas politik dominan.

4. Pengertian Santri

Kata santri menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah, pertama orang yang mendalami agama Islam, kedua orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh (orang yang saleh), ketiga orang yang mendalami tentang pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh yang disebut sebagai pesantren. Santri secara universal merupakan sebutan untuk seseorang atau kelompok yang mengikuti pendidikan ajaran agama Islam di pesantren, dan biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai.

Selanjutnya menurut Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa santri merupakan murid-murid yang tinggal di dalam lingkungan pondok pesantren untuk mengikuti pembelajaran tentang kitab-kitab kuning atau kitab-kitab Islam klasik yang pada umumnya terdiri dua kelompok santri ialah, pertama santri mukmim yaitu santri atau murid-murid yang berasal dari jauh untuk menetap atau tinggal dalam lingkungan pondok pesantren dan yang kedua santri kalong yaitu santri yang berasal dari desa-desa sekitar lingkungan pesantren yang mereka tidak menetap di dalam lingkungan area pesantren namun sehabis mengikuti pembelajaran mereka langsung pulang²³.

²³ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (LP3S, Jakarta, 1982), hal. 51

Di dunia pesantren juga bisa dilakukan oleh seorang santri pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Bisanya kepindahannya itu karena ingin menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian dari seorang kiai yang berada di pondok pesantren yang didatanginya itu²⁴. Pengertian ini senada dengan pengertian santri secara umum, yaitu orang yang belajar agama Islam di sebuah pesantren yang menjadi tempat belajar santri, selain itu santri adalah mereka yang taat dengan melaksanakan perintah agama. Sedangkan asal usul perkataan santri setidaknya ada dua pendapat yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, dari kata “santri” yang berasal dari bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Kedua kata “santri” yang berasal dari bahasa jawa, yaitu Cantrik yang artinya seseorang yang mengikuti seorang ustad atau kiai kemanapun ia pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar suatu keilmuan kepadanya.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia artinya manusia yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kreatif, disiplin, bertanggung jawab dan sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal cinta kepada tanah air serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi kedepannya. Dalam hal ini juga titik tekanan pada pendidikan nasional adalah mendambakan bentuk masyarakat yang adil dan makmur sejahtera untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Jadi untuk mewujudkan pendidikan nasional tersebut, maka pemerintahan telah menetapkan suatu kebijakan tentang mengedepankan pembaruan pembelajaran dalam sistem pendidikan. Khususnya dalam hal pendidikan agama sebagai pedoman hidup.

²⁴ Zulhimma, ”Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia”, dalam Jurnal Darul ‘Ilmi, Vol 1, No 2, (2013), 171.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional islam untuk mempelajari, menghayati dan mengamal ajaran-ajaran agama islam dengan mengedepankan kepentingan moral agama islam sebagai pedoman hidup masyarakat sehari-hari. Di negara Indonesia merupakan salah satu bentuk kebudayaan asli bangsa Indonesia, karena lembaga pendidikan menggunakan pola kyai, murid atau santri dan asrama yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pondok pesantren merupakan salah satu kekayaan nasional.

5. Konsep Pemilu

Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu yang beraneka ragam, seperti presiden dan wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintah sampai kepala desa. Pengertian pemilu menurut pasal 1 Undang-Undang No 7 tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pengertian pemilu menurut para ahli. Menurut Dahlan Thaib mengatakan pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilihan umum merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi. Definisi ini menunjuk secara langsung pada makna pemilu yang diatur oleh konstitusi. Prinsip-prinsip pemilu, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan prinsip dasar pemilu yang sudah seharusnya digariskan oleh konstitusi, sehingga seseorang yang terpilih melalui pemilu untuk

menjalankan pemerintahan dan dapat melaksanakannya berdasarkan prinsip pemerintah yang demokratis.²⁵

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti menyatakan bahwa pemilu sebagai instrumen yang dirumuskan sebagai berikut. Pertama mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai kehendak rakyat. Kedua mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan public atau mengenai sirkulasi elite politik secara periodik dan tertib. Ketiga mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga pemerintahan untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.²⁶ Ramlan Surbakti menyebut pemilu sebagai instrumen yang berarti sebagai alat atau fasilitas untuk menuju ke satu tujuan. Dengan membagi menjadi tiga tujuan, yaitu untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, beradab dan pembatasan kekuasaan secara berkala.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan aktivitas retorika atau pidato, public relations (hubungan masyarakat), komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Secara konseptual pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Hal ini dengan melalui legitimasi kekuasaan rakyat yang diimplementasikan ke dalam penyerahan atau memberikan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen atau pemerintahan. Maka dengan menggunakan mekanisme

²⁵ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta: 2009, hlm, 98.

²⁶ Ramlan Surbakti, dkk, *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Cet 1, Kemitraan, Jakarta: 2008, hlm., 32.

tersebut, rakyat sewaktu-waktu dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan terhadap pemerintah.

Samuel P. Huntington mengatakan pemilihan umum adalah dasar dari demokrasi. Setiap warga negara harus memiliki kesetaraan dan kesempatan untuk memilih dan serta semua suara pemilih wajib dihitung secara setara. Pemilihan umum harus bebas dan adil. Bebas yang berarti warga negara dalam memberikan suara harus terbebas dari memilih rasa khawatir. Setelah itu adil berarti semua pemilih diperlakukan secara setara atau sama setiap individu atau kelompok. Kebebasan berfikir, berpendapat, dan berekspresi merupakan syarat utama untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien. Ciri kebebasan ini warga negara akan kehilangan kapasitasnya untuk berpartisipasi politik. Penerapan pemilihan umum yang demokratis adalah persyaratan yang utama untuk warga negara agar bisa bergerak dalam berpartisipasi politik. Pemilihan umum yang demokrasi dari penjelasan Samuel P. Huntington diatas dapat diuraikan sebagai berikut,

- a. Diadakan secara berkala
- b. Diikuti oleh kontestan lebih dari satu
- c. Ada pengakuan terhadap prinsip hak suara yang universal
- d. Ada komite atau panitia pemilu yang independen
- e. Ada kebebasan untuk mengetahui dan mendiskusikan pilihan

Kualitas pemilihan umum atau pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi politiknya. Angka partisipasi politik tinggi menunjukkan warga negara akan mengerti masalah-masalah politik yang ada dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Sedangkan angka partisipasi politik rendah menunjukkan warga negara yang tidak peduli terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga penulis

dapat memperoleh dan mencari teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dicoba penulis. Penelitian terdahulu, tidak menggunakan judul yang sama seperti judul penulis. Tetapi penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa jurnal atau skripsi yang terkait dengan penelitian penulis disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama penulis	Tujuan penelitian	Teori yang digunakan	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini
1.	Siti Maimunah tahun 2008 tentang partisipasi politik santri pemilih pemula pada pemilihan Gubernur Jawa timur di Pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo	Mengidentifikasi tentang bagaimana partisipasi politik santri pemilih pemula pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo terhadap pemilihan Gubernur di Jawa Timur tahun 2018 dan mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik santri pemilih pemula pada pemilihan Gubernur di Jawa Timur tahun 2108 di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo	Teori partisipasi politik	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Pondok pesantren mengizinkan santri-santrinya sebagai pemilih pemula yang telah mencapai umur 17-21 tahun untuk berpartisipasi atau berantusias pada pemilihan Gubernur Jawa timur dan memberikan hak suaranya untuk mencoblosnya dan kecuali tidak diizinkan untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye pasangan calon manapun.	Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang partisipasi politik santri. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada obyek penelitian, jika penelitian sebelumnya dilakukan di Probolinggo Jawa timur di Pondok pesantren Nurul Jadid Paiton, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kudus Jawa tengah di Pondok Pesantren

						Ar-Roudlotul Mardiyah Kudus.
2.	Desi Ayu Lestari 2018 tentang budaya politik dan perilaku politik santri (studi tentang tingkat partisipasi politik santri Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018	Untuk mengetahui berapa besar tingkat partisipasi pemilih pemula yang aktif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Dan untuk menjelaskan apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018	Teori partisipasi politik, teori budaya politik dan teori perilaku politik	Menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat empiris	Tingkat partisipasi politik pemilih pemula siswa kelas XII SMK dan SMA Pondok pesantren Darut Tauhid Bandung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 pada aspek keikutsertaan memilih karena memiliki calon yang diunggulkan, 61 % menyatakan sangat setuju dan 34,1% menyatakan setuju. Berdasarkan responden hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebagian responden mengetahui visi dan misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dipilih untuk	Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang partisipasi politik santri. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian, jika penelitian sebelumnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 sedangkan penelitian ini pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Kudus.

					dijadikan sebagai calon unggulan.	
3.	Edwin Nazar Zulmi, 2011, tentang partisipasi santri Ath-Thohariyyah dalam pilkada Banten tahun 2011	Untuk mengetahui bagaimana partisipasi santri pondok pesantren Ath-Thohiriyah dalam pilkada banten tahun 2011	Menggunakan teori Nelson dan Huntington yaitu partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi serta teori Gabriel Almond yaitu partisipasi konvensional dan non konvensional	metode kualitatif pendekatan deskriptif	Menunjukkan bahwa partisipasi santri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah dalam pilkada Banten tahun 2011 termasuk dalam partisipasi otonom hanya saja para santri diberikan masukan atau gambaran mengenai pasangan calon, agar tidak salah pilih.	Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang partisipasi politik santri. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan teori Nelson dan Huntington yaitu partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi dan penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik dan teori perilaku politik
4.	Delpi Andrian,	Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah dan untuk	Teori pilihan	Menggunakan	Bahwa Kelurahan Surabaya, Kecamatan	Persamaan dalam penelitian ini adalah

<p>2019 tentang Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan umum prosiden 2019 (studi pada Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)</p>	<p>mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung terhadap Pilpres 2019</p>	<p>rasional dan teori Fiqh Siyasah</p>	<p>penelitian field research (penelitian lapangan</p>	<p>Kedaton Bandar Lampung, masih kurang baik dalam pemilihan umum prosiden di tahun 2019. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran politik masyarakat masih sangat pasif.</p>	<p>tentang partisipasi politik. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada obyek penelitian, jika penelitian sebelumnya tertuju pada masyarakat umum di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan penelitian ini tertuju pada santri pondok pesantren Ar-Roudlotul Mardliyyah Kudus.</p>
--	---	--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka dalam hal ini warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu-individu, yang dimaksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Diselenggarakannya pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini aktivitas politik juga memasuki dunia keagamaan, ekonomi, kemasyarakatan atau sosial, kehidupan pribadi. Pada daerah-daerah yang mempunyai basis santri sulit untuk dipisahkan dengan sosok ulama atau Kiai yang merupakan elite kultural dan memiliki pengaruh besar dalam pilihan politik santri dan tak terkecuali dalam urusan menentukan dan memilih calon atau kandidat wakil rakyat dan kepala pemerintahan, seperti Presiden dan Wakil Presiden atau legestlatif yang akan dipilih santri saat ikut serta pemilihan umum. Setiap fenomena dalam pemilihan umum, santri yang berusia 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih, santri dan kiai selalu menjadi perebutan oleh partai-partai politik berbasis Islam maupun juga partai-partai politik berbasis nasional dalam mendapatkan dukungan masa yang lebih banyak. Dari melibatkan kiai dan tokoh pesantren hal ini memperlihatkan kecenderungan bahwa nilai politik seorang kiai di hadapan partai politik masih cukup tinggi, karena upaya mereka masih

mencari dan membangun dukungan dengan masyarakat pesantren untuk kepentingan politiknya sendiri setiap waktu pemilu. Oleh karena itu pondok pesantren beserta santri dan kiainya mempunyai kekuatan politik yang kuat dan menjadi incaran berbagai macam partai politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pesantren tentunya. Hal ini menggunakan teori partisipasi politik dan teori perilaku politik. Teori ini digunakan untuk mengetahui partisipasi politik santri pada pemilihan umum tahun 2019 seperti bentuk partisipasi santri dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berpartisipasi politik.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

